

ASPEK HUKUM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS MEREK DAGANG YANG DIDAFTARKAN MELALUI *MADRID PROTOCOL*

Dona Bella Faustine Law

01659210022

ABSTRAK

Protokol Madrid memudahkan pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya di negara-negara yang tergabung dalam protokol. Namun, jika perseroan terbatas bangkrut, ini juga akan mempengaruhi merek dagang yang terdaftar melalui Protokol Madrid. Padahal, merek yang telah dilelang pada tahap penyelesaian harta pailit dan telah dialihkan kepada pemilik merek hanya berlaku untuk merek yang terdaftar di Indonesia, sehingga merek yang telah terdaftar di negara lain tidak dapat segera dialihkan kepada pemilik merek yang baru. Dengan melakukan penelitian, bertujuan untuk mencari solusi dalam mengalihkan merek dagang yang terdaftar di negara anggota Protokol setelah perusahaan bangkrut

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris normatif dengan menggunakan buku, jurnal, atau karya ilmiah terkait sebagai sumber penelitian yang kemudian diperkuat dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten di bidang merek. Dalam hal ini penulis menganalisis tanggal yang diperoleh untuk digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepailitan transnasional secara lengkap sehingga apabila terdapat harta pailit di negara lain seperti merek dagang tidak mudah untuk dieksekusi. Hal ini juga karena prinsip kedaulatan negara yang harus dihormati oleh negara lain. Dalam praktiknya, jika terjadi sengketa, maka pengalihan merek tersebut harus dimintakan di masing-masing negara anggota Protokol dan tidak dapat melalui Biro Internasional. Untuk itu menjadi suatu urgensi untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar dapat mengatasi masalah tersebut dan memberikan kepastian bagi pemilik merek. Selain itu, mengenai tata cara pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.

Kata Kunci: Pailit, Merek, Protokol Madrid.

**LEGAL ASPECT OF LIMITED LIABILITY COMPANY BANKRUPTCY
REGARDING THE TRANSFER OF RIGHTS TO TRADEMARKS
REGISTERED THROUGH THE MADRID PROTOCOL**

Dona Bella Faustine Law

01659210022

ABSTRACT

The Madrid Protocol makes it easy for trademark owners to register their trademarks in countries that are members of protocol. However, if a limited liability company goes bankrupt, this will also affect the trademark registered through the Madrid Protocol. In fact, trademarks that have been auctioned during the bankruptcy estate settlement stage and have been transferred to the brand owner are only valid for trademarks registered in Indonesia, so that trademarks that have been registered in other countries cannot immediately be transferred to a new brand owner. By conducting research, it aims to find a solution in transferring trademarks registered in Protocol member countries after the company goes bankrupt

This research used a normative empirical research method using books, journal, or related scientific works as a research source which was then corroborated by primary data obtained in the field. Data collection techniques were carried out through literature studies and conducting structured interviews with competent sources in the field of brands. In this case author analyzes the data obtained to be used in answering the problems in the research.

The results shows that until now there are no law and regulations governing transnational bankruptcy completely so that if there are bankrupt assets in other countries such as trademarks, it is not easy to execute. This is also due to the principle of state sovereignty which must be respected by other countries. In practice, if a dispute occurs, the transfer of the mark must be requested in each member country of the Protocol and cannot go through the International Bureau. For this reason, it becomes an urgency to immediately revise Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, so that it can deal with this problem and provide certainty for brand owners. In addition, regarding the procedures for its implementation, it can be regulated further through government Regulations or Ministerial Regulation.

Key Word: Bankruptcy, Trademark, *Madrid Protocol*